

# PARADIGMA ISLAMISASI DAN INTEGRALISME PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Islam Terpadu)

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau  
alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id

## Abstract

*Education is the main pillar of the rise of a country and nation. The ideology and paradigm of thought of educational leaders are the life of the world of educational effectiveness in a country. Islam is a strict teaching about education with the term compulsory education from buayan to grave. The education cycle starts from the mother's womb (womb) to the soil content (barzah). These three natural linkages make Muslim thinkers who are concerned about education that links between the three realms (womb, world and barzah). The integralism paradigm of education emerged which tried to incorporate the values of revelation and sunnah in the world of education, both science and technology. No less important is the education thinker who connects science and technology with imtaq (Islamization). These two terms gave birth to new institutions in the world of education. The integralism paradigm includes religious values in science and technology, giving birth to religious education institutions with nuanced science and technology, for example modern Islamic schools (MIM) or Global MI (MIG), International MI (MII), and others. Likewise, the paradigm of Islamization of education gave birth to educational institutions that connected science and technology with imtaq, for example integrated Islamic elementary schools and tahfizd (SDIT and SDITh) and the like. Basically the two ideologies of thought have the same substance, but the effects that are different from each other, namely MIG, MIM and MII become as if they were public schools, while SDIT seems like a religious school. In substance, these two educational institutions do not violate the legislation concerning the national education system from the point of view of education, but ideologically both can be said to be the psimism of educational science. According to the authors both must be equated scientifically and the legality and formality. But in the view of Islamic education MI is more important than SDIT.*

**Keywords:** *Paradigm, Islamization, Integralism, Islamic Education*

**Abstrak :** Studi Pendidikan merupakan tonggak utama tiang-tiang kebangkitan suatu Negara dan bangsa. Ideology dan paradigma pemikiran tokoh pendidikan menjadi nyawa terhadap dunia efektivitas pendidikan disuatu Negara. Islam merupakan ajaran yang menkonter ketat tentang pendidikan dengan istilah wajib belajar dari buayan sampai liang lahat. Siklus pendidikan dimulai dari kandungan ibu (rahim) sampai kandungan tanah (barzah). Keterkaitan tiga alam ini membuat para pemikir muslim yang konsen terhadap pendidikan yang mengkaitkan antara ketiga alam tersebut (alam rahim, dunia dan barzah). Muncullah paradigma integralisme pendidikan yang

mencoba memasukkan nilai-nilai wahyu dan sunnah dalam dunia pendidikan, baik sains maupun teknologi. Tidak kalah penting pula pemikir pendidikan yang menghubungkan antara iptek dengan imtaq (islamisasi). Kedua term ini melahirkan institusi-institusi baru dalam dunia pendidikan. Paradigma integralisme memasukkan nilai-nilai agama dalam iptek, melahirkan lembaga pendidikan agama yang bernuansa iptek, misalnya madrasah ibtidaiyah modern (MIM) atau MI Global (MIG), MI Internasional (MII), dan lainnya. Demikian juga paradigma islamisasi pendidikan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang menghubungkan antara iptek dengan imtaq, misalnya sekolah dasar Islam terpadu dan tahfizd (SDIT dan SDITh) dan sejenisnya. Pada dasarnya kedua ideology pemikiran ini mempunyai substansi yang sama, namun berdampak yang saling berbeda, yaitu MIG, MIM dan MII menjadi seolah seperti sekolah umum, sedangkan SDIT seolah seperti sekolah agama. Secara substansi kedua lembaga pendidikan ini tidak menyalahi peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional dari sudut tujuan pendidikan, namun secara ideology keduanya dapat dikatakan psimisme ilmu pendidikan. Menurut penulis keduanya mesti disetarakan secara keilmuan dan legalitas serta formalitasnya. Namun dalam pandangan ilmu pendidikan Islam MI lebih utama dari SDIT.

**Kata Kunci:** Paradigma, Islamisasi, Integralisme, Pendidikan Islam.

## PENDAHULUAN

Ilmu itu cahaya yang menerangi seluruh alam semesta tanpa terkecuali jenis dan macam ilmu. Ilmu imtaq dan iptek pada dasarnya satu kesatuan yang saling menopang tanpa bisa terpisahkan dalam disiplin ilmu Islam. Namun pemikiran para orientalis mengacaukan dunia ilmu dan pendidikan, yang kemudian melahirkan dikotomi ilmu dan pendidikan. Negara-negara mayoritas muslim seperti Negara kita Indonesia dan Negara jiran Malaysia masih terus menjalankan proses islamisasi pendidikan.<sup>1</sup> Keadaan seperti ini masih terus berlangsung bahkan proses islamisasi tersebut menjalar ke pendidikan tingkat dasar, menengah dan bahkan perguruan tinggi. Misalnya di pendidikan dasar muncul madrasah ibtidaiyah modern (MIM), madrasah ibtidaiyah global (MIG) dan madrasah ibtidaiyah internasional (MII).

Pergulatan paradigma umum dan Islam melahirkan pemikir alternatif seperti Al-Kindi. Menurut al-Kindi bahwa filsafat dan agama merupakan dua hal yang berbeda baik dari aspek sumber maupun metodenya. Menurut ilmu filsafat, ajaran

---

<sup>1</sup>Santoso, M. Abdul Fattah. (2016). "Rekonstruksi Epistemologi Keilmuan Islam: Tinjauan, Sumber, Tujuan, dan Metode Keilmuan". *Makalah untuk Seminar Internasional, "Rekonstruksi Epistemologi Islam"* oleh UMS dan IIT East and Southeast Asia, 24 Mei, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

agama berasal dari Tuhan semesta alam (allah), sedangkan ilmu filsafat berasal dari pengalaman dan pengetahuan secara tersistematis. Walaupun tujuan inti dari filsafat dan agama adalah suatu kebenaran akan keberadaan Allah dalam alam fisika dan metafisika, maka finis dari kedua pemahaman tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan. Dengan demikian menurut Al-Kindi substansi dan puncak dari kebenaran yang hakiki ada di Allah tuhan yang maha tinggi, hal ini merupakan tujuan ini dari agama dan filsafat.<sup>2</sup> Inilah filosofis yang melatar belakangi kembalinya Islam kepada ideology ilmu yang sebenarnya. Lalu muncul istilah islamisasi dan integrasi ilmu dan sains.

Berkaitan dengan istilah integrasi ilmu didengungkan kembali merupakan girah bersama seluruh umat Islam yang menginginkan kebangkitan dalam mutu pendidikan Islam. Walaupun teorinya seharusnya pendidikan agama lebih maju dari pendidikan lainnya, itu juga seharusnya outputnya.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari hirarki landasan hukum yaitu UUD tahun 1945, pada Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 31, juga Pasal 3 Undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 No. 20, bahwa pelaksanaan pendidikan bermuara pada pembentukan manusia yang seutuhnya, yakni manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat jasmani, berilmu dan berkompentensi, cakap dan kreatif serta mandiri, juga menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan demokratis.<sup>4</sup>

Gagasan integrasi (nilai-nilai islami dan umum) mungkin suatu konsep yang ‘usang’ untuk dibahas ulang, mengingat dikotomi ini sudah mengakar kuat sejak abad pertengahan yang lalu. Namun demikian, berkembangnya gagasan-gagasan untuk mengkajinya lebih dalam mampu memberikan spektrum yang sangat luas, bahkan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dicermati secara kritis dan tajam, sehingga masalah dikotomi ilmu ini diharapkan tidak berimplikasi lebih luas dalam pelaksanaan pendidikan Islam terutama di tengah upaya umat Islam untuk melakukan

---

<sup>2</sup>Nasution, Harun. (2010). *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15-16.

<sup>3</sup>Fiteriani, Ida. (2014). “Analisis Model Integrasi Ilmu dan Agama dalam Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Bandar Lampung”. *Terampil*, Vol 2, Nomor 2, 1-35, hlm. 1

<sup>4</sup>Lembaran Negara. (2003). *Undang-undang Sistem pendidikan Nasional*. Jakarta: Sisdiknas, 1-33.

pembaharuan guna memperbaiki mutu pendidikan Islam yang masih tertinggal dan termarginalkan.<sup>5</sup>

Gagasan integrasi pendidikan dalam keilmuan Islam sebenarnya masih selalu di upayakan oleh para penggiat pendidikan Islam. Historis lahirnya integrasi ilmu ini dimulai dari adanya dualisme keilmuan, yang disebut dengan ilmu umum dan ilmu agama.<sup>6</sup> Upaya integralisme pendidikan ini melahirkan lembaga pendidikan sederajat dengan MI misalnya SDIT (sekolah dasar islam terpadu dan tahfizd).

Menurut pakar filsafat pendidikan Islam dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta sekaligus yang mempopulerkan integrasi atau integralisme ilmu dan pendidikan, yaitu Amin Abdullah,<sup>7</sup> sebenarnya sejarah kependidikan Islam telah terbelah menjadi dua wajah sejak lama, yaitu paradigm integralistik-ensiklopedik dan paradigma spesifik-paternalistik. Pemikiran untuk mengembangkan keilmuan yang terintegrasi sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam, misalnya Ibnu Sina integrasi ilmu agama dengan kedokteran, Ibnu Rusyd mengintegrasikan antara filsafat dan agama, dan Ibnu Khaldun juga mengikuti keduanya.<sup>8</sup> Selain mereka maka para pakar ilmu hadis dan fiqh merupakan dikotomi atau spesifik keahlian saja.<sup>9</sup> Keberadaan dua paradigm inilah yang berujung pada rendahnya dan mundurnya kualitas pendidikan Islam.<sup>10</sup>

Pakar pendidikan Islam sekaligus yang mempopulerkan islamisasi ilmu dan pendidikan Naquib al-Attas berpendapat bahwa, proses Islamisasi mesti mencakup seluruh aspek keilmuan, dari sudut filosofis, paradigma dan kelangsungan pendidikan keilmuan Islam.<sup>11</sup> Sementara di sisi lain proses pembelajaran hanya mengikuti serta mempraktekkan yang telah di wariskan para pendahulunya. Pada masa ini keunggulan

<sup>5</sup>Fiteriani, Ida. (2014). “Analisis Model Integrasi Ilmu, hlm. 4

<sup>6</sup>Istikomah. (t.th). “Integrasi Ilmu Sebuah Konsep Pendidikan Islam Ideal”. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), hlm. 1

<sup>7</sup>Abdullah, M. Amin. (2004). *Dalam Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum Upaya Mempersatukan Epistimologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 11

<sup>8</sup>Aminuddin, Luthfi Hadi. (2010). “Integrasi Ilmu dan Agama: Studi Atas Paradigma IntegratifInterkonektif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. *Kodifikasia*, Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya Nomor 1 Volume 4, 181-214, hlm. 184

<sup>9</sup>Abdullah, M. Amin. (2003). *Etika Taubidik Dasar Kesatuan Epistimologi Keilmuan Umum dan Agama, dalam Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum*. Yogyakarta: SUKA PRESS, IAIN Sunan Kalijogo, hlm. 21; lihat juga Yunus, Muh. (2014). “Integrasi Agama dan Sains: Merespon Kelesuan Tradisi Ilmiah di PTAP”. *Insania*, Vol. 19, No. 2, 284-313, hlm. 285.

<sup>10</sup>Zainuddin, M. (2004). “UIN: Menuju Integrasi Ilmu dan Agama” dalam M. Zainuddin ,dkk., editor, “Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan”. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 5.

<sup>11</sup>Al-Atas, Muhammad Naquib. (2001). *Islam dan Sekulerisme*. Bandung : Pustaka , hlm. 148

sistem pendidikan hanya pada aspek ilmu pengetahuan tidak sampai ke teknologi masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Dua model paradigma dan pemikiran tentang pendidikan Islam yang saling melahirkan lembaga-lembaga baru tapi desain lama hanya saja memiliki asesoris yang religius dan modern, hal ini nampak pada dua jenis lembaga pendidikan dasar yang saling bersaing dalam dunia pendidikan Islam yaitu MI dan SD. Namun mempunyai tren baru dengan sebutan MIM, MIG dan MII serta SDIT, SDITh (tahfizd).

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi kajian dalam artikel ini adalah bagaimana asal usul lahirnya MI dan SDIT dalam dunia pendidikan serta bagaimana tinjauan analisis substantif islamisasi dan integralisme pendidikan pada undang-undang sistem pendidikan nasional no. 20 tahun 2003 berkaitan tujuan pendidikan dan legalitas formalnya ?.

## PEMBAHASAN

### Histori Madrasah Ibtidaiyah dalam Pendidikan Islam.

Pemahaman tentang apa itu madrasah sudah terbiasa di dengar, bahwa madrasah itu tempat belajar umat Islam. Kata asalnya “darasa” diartikan belajar, “madrasah” tempat belajar.<sup>13</sup> Ungkapan term madrasah hampir tidak ditemukan dalam referensi lain kecuali suatu lembaga institusi untuk belajar agama bagi umat Islam.<sup>14</sup>

Menurut PP<sup>15</sup> dan KBMA<sup>16</sup> dan KBMDN<sup>17</sup> yang mengurus madrasah, memberikan pengertian suatu lembaga pendidikan agama Islam yang menggunakan

---

<sup>12</sup>Hasyim, Rosnani dan Imron Rosyidi. (2000). “Islamization Of Knowledge Comparative Analysis Of The Conception Of Al-Atas And Al-Faruqi”, *Journal Of The Kulillyah (Faculty) Of Islamic Reveald And Human Science International* , Vol ,8,No.1, hlm. 18-19

<sup>13</sup>Munawir, A.W. (1997). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, hlm. 429.

<sup>14</sup>Kosim, Mohammad. (2007). “Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)”. *Tadris*. Volume 2, Nomor 1, 41-57, hlm. 42; lihat juga Nata, Abudin. (2001). *Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 204

<sup>15</sup>Peraturan Pemerintah

<sup>16</sup>Keputusan Bersama Menteri Agama

<sup>17</sup>Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri

dua kurikulum, yaitu kurikulum umum dan agama, mata pelajaran agama pada madrasah lebih banyak dibanding dengan mata pelajaran agama di sekolah umum.<sup>18</sup>

Sebenarnya kemunculan dan keberadaan lembaga pendidikan madrasah selalu didahului suatu organisasi dan gerakan pembaharuan dalam Islam serta beberapa aktor intelektualnya, dari mulai daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi serta Maluku.<sup>19</sup>

Setelah lahirnya madrasah, pada tatanan prakteknya madrasah juga terdiri dari dua versi, ada versi madrasah diniyah dan madrasah duniyah. Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang kurikulumnya 100% materi agama. Adapun madrasah duniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang kurikulumnya, di samping materi agama, meliputi mata pelajaran umum dengan persentase beragam.<sup>20</sup>

Definisi eksplisit madrasah ibtidaiyah adalah merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran keilmuan terendah dalam Islam, juga bermuatan mayoritas ajaran agama dan diselingi pula dengan pelajaran dan pembelajaran umum.<sup>21</sup> Maka MI adalah pendidikan setingkat SD pada pendidikan umum. Keduanya menurut undang-undang sederajat dalam pendidikan dasar formal.

Namun keberadaan madrasah pada tahun 1970-an penyelenggaraannya di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu masyarakat Islam keberatan dan protes.<sup>22</sup> Hal ini membuat pemerintah tanggap sehingga dilakukan rutin pembinaan demi mutu pendidikan madrasah di masa akan datang, sehingga lahirlah Kepres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 tentang pemerintah berkebijakan agar madrasah lebih operasional. Sehingga pemerintah menerbitkan juknis (petunjuk teknis) Kepres nomor 34 dan Impres nomor 15 tahun 1974 yang berikan: 1). Pembinaan pendidikan agama menjadi tanggung jawab menteri agama, sedangkan pendidikan umum yang bertanggung jawab Kementrian pendidikan dan

---

<sup>18</sup>Kosim, Mohammad. (2007). "Madrasah di Indonesia, hlm. 42; lihat juga Supani. (2009). "Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia". *Insania* | Vol. 14 | No. 3, 1-14, hlm. 2

<sup>19</sup>Noer, Deliar. (2005). *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1990-1942*. Jakarta, LP3ES, hlm. 7.

<sup>20</sup>Kosim, Mohammad. (2007). "Madrasah di Indonesia, hlm. 42; lihat juga Supani. (2009). "Sejarah Perkembangan Madrasah, hlm. 2-3

<sup>21</sup>Kosim, Mohammad. (2007). "Madrasah di Indonesia, hlm. 48; lihat juga Drajat, Manpan. (2018). "Sejarah Madrasah di Indonesia". *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, 196-206, hlm. 199

<sup>22</sup>Maksum. (2000). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos, hlm. 127-131

kebudayaan. 2). Dalam pelaksanaan Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Impres nomor 15 tahun 1974 agar tercapai dengan maksimal diperlukan kerjasama antar departemen P dan K departemen dalam negeri dan agama.<sup>23</sup>

Sesudah muncul juknis, maka diusulkan adanya penyusunan (SKM) surat keputusan bersama 3 menteri pada tanggal 24 maret 1975, dengan menyebutkan bahwa madrasah setara dan sederajat dengan sekolah, misalnya dalam Bab I pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa madrasah itu mempunyai tiga level: a). level satu setara sekolah dasar (SD) yaitu madrasah ibtidaiyah, b). level dua sederajat sekolah menengah pertama (SMP) yaitu madrasah tsanawiyah, c). level tiga setara sekolah menengah atas (SMA) yaitu madrasah aliyah.<sup>24</sup>

### **Sejarah Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Pendidikan Islam.**

Pendidikan formal di Indonesia ada dua model. Model yang pertama adalah sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Pendidikan formal model kedua adalah sekolah yang sering dikenal dengan istilah sekolah agama, misalnya MI, MTs dan MA.<sup>25</sup> Maka yang kedua inilah perwujudan dari lembaga pendidikan Islam dalam Sisdiknas. Sekolah umum basisnya adalah pelajaran umum 70 % sisanya pelajaran agama.<sup>26</sup>

Sedangkan lembaga pendidikan saat ini ada tiga model yang berkembang di Indonesia yaitu sekolah (umum) sebagaimana tersebut di atas, madrasah (agama) demikian juga tersebut di atas, dan pesantren. Sisdiknas secara legal membawahi dua lembaga pendidikan tersebut, baik pendidikan agama maupun umum. Hanya saja kewenangan dibagi kepada dua departemen, sekolah kewenangan departemen pendidikan dan kebudayaan, sedangkan sekolah madrasah dalam wewenang

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI. (2005). *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, hlm. 64.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI. (2005). *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, hlm. 64-65.

<sup>25</sup>Mualimin. (2017). "Lembaga Pendidikan Islam Terpadu". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I, 99-116, hlm. 103

<sup>26</sup>Fathoni, M. K. (2015). *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 7

kementrian agama, ada lembaga pendidikan yang tidak bernaung pada keduanya yaitu pondok pesantren.<sup>27</sup>

Ketiga tipe lembaga pendidikan di atas, menurut pengagas sekolah Islam terpadu sudah gagal mewujudkan cita-cita pendidikan nasional mencerdaskan anak bangsa. Ketiganya dianggap tidak mampu melahirkan generasi yang ber-IMTAQ dan IPTEK sesuai tujuan pendidikan dalam Sisdiknas. Lembaga pendidikan umum hanya mencetak alumni pandai teknologi tetapi kosong aqidah. Lembaga pendidikan agama hanya melahirkan generasi yang pandai ngaji tapi tidak sanggup menghadapi persaingan di dunia modern. Sedangkan lembaga pendidikan madrasah pada dasarnya ingin membuat jalan tengah, namun sampai saat ini keberadaannya belum sepenuhnya diterima masyarakat.<sup>28</sup>

Menghadapi ketidakpuasan pada pendidikan yang sedang berlaku di Indonesia, maka beberapa pemikir yang giat dalam dunia pendidikan mulai mendesain model terbaru pendidikan yang relevan dalam menggabungkan antara sains, teknologi, keilmuan dan keagamaan. Muncullah ide sekolah berbasis multi disipliner keilmuan umum dan agama, yang lebih dikenal dengan sekolah Islam terpadu, hal ini dilakukan untuk menangkis keterpurukan dalam sistem pada lembaga pendidikan dan kependidikan. Juga sebagai upaya mengembalikan ulang kejayaan dunia pendidikan pada masa rasul, sahabat dan keemasan Bani Abbasyiah.<sup>29</sup>

Model lembaga pendidikan seperti itu pada dasarnya telah canangkan para cendekiawan Muslim untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan di dunia Islam. Seorang cendekiawan Muslim asal Pakistan, menawarkan salah satu pendekatannya dengan cara memakai konsep sekuler dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam penerapannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa: upaya membentuk tabiat kepribadian pelajar dan mahasiswa dengan nilai-nilai keislaman untuk pribadi dan masyarakat, juga agar para ahli pendidikan modern memberikan label keahliannya dengan istilah yang Islami.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional Integrated Islamic Schools In The National Education System". Jurnal "Al-Qalam" Volume 21 Nomor 1, 1-10, hlm. 4

<sup>28</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 4

<sup>29</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 4

<sup>30</sup>Rahman, Fazlur. (2005). *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*. terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, hlm. 160

Selain Fazlu Rahman, al-Faruqy menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam harus dipadukan dengan sistem sekuler. Perpaduan kedua model sistem pendidikan akan lebih baik untuk kedepannya daripada memakai satu model saja.<sup>31</sup> Dengan demikian, ilmu-ilmu agama Islam akan selalu bersinggungan dengan realitas kehidupan sehari-hari dan ilmu-ilmu umum modern dapat dilinierkan dalam sistem pendidikan berkerangka Islami.<sup>32</sup>

Secara tidak langsung, keberadaan sekolah Islam terpadu merupakan pengejawantahan dari integralisme dari sistem terbaru dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tampak pada penggunaan nama sekolah, kesediaan sekolah Islam terpadu untuk menerima sepenuhnya kurikulum yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan ujian yang menyesuaikan dengan ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan program sertifikasi oleh guru-guru di sekolah Islam terpadu.<sup>33</sup>

### **Analisis Substantif Islamisasi dan Integralisme Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Islam Terpadu menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.**

Dua lembaga pendidikan tingkat dasar yang sama-sama dilindungi oleh undang-undang sistem pendidikan nasional sebagai upaya kewajiban Negara mencerdaskan anak bangsa. Maka dari kedua lembaga tersebut menurut substantif islamisasi dan integral pendidikan jika ditinjau dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut:

#### **Madrasah Ibtidaiyah (MI).**

Dengan dikeluarkannya Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974, maka pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional terhadap pelaksanaan lembaga pendidikan madrasah. Dikeluarkannya SKBL (Surat Keputusan

---

<sup>31</sup>Al-Faruqy, Ismail Raji. (2004). *Islamisasi Pengetahuan*. terj. Anas Mahyudin. Bandung: PustakaPerpustakaan Salman Institute Teknologi, hlm. 25

<sup>32</sup>Nakosteen, Mehdi. (2006). *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*. terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 212-218; lihat juga Muqowim. (2012). *Genealogi Intelektual Saintis Muslim Sebuah Kajian tentang Pola Pengembangan Sains dalam Islam pada Periode 'Abbasiyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, hlm. 113-282

<sup>33</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5 dan 9

Bersama) Tiga Menteri, yaitu, Menteri Agama, Pendidikan dan kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Dalam konteks ini, sejumlah diktum yang memperkuat posisi Madrasah diantaranya adalah: Bab I ayat 2 Madrasah meliputi tiga tingkatan : 1). Madrasah Ibtida'iyah, setingkat dengan Sekolah dasar. 2). Madrasah Tsanawiyah selevel dengan SMP. 3). Madrasah aliyah sederajat dengan SMA/SMU. Pada Bab II Pasal 2, 1). Bahwa Ijazah bernilai sama dengan sekolah umum. 2). Lulusannya dapat menyambung ke tingkat yang lebih tinggi baik di pendidikan agama maupun umum. 3). Siwa madrasah dibenarkan saling pindah satu sama lainnya.<sup>34</sup>

Secara hukum kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional lebih kuat lagi dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum ciri khas pendidikan agama Islam. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa Madrasah Ibtida'iyah dan Madrasah Tsanawiyah melaksanakan Kurikulum Nasional Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Posisi integrasi pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional selain pada beberapa poin di atas juga tercermin dalam beberapa aspek sebagai berikut: 1). Pendidikan umum nasional mewajibkan pendidikan agama sebagai pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan. 2). Madrasah dalam Sisdiknas dengan sendirinya kategori pendidikan luar sekolah. 3). Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki jalur khusus dalam ilmu syariah.<sup>35</sup>

Menilik dari kedudukan madrasah di atas, maka merupakan suatu tanggung jawab bagi setiap komponen yang terlibat didalamnya untuk mempertahankan posisi tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu keunggulan madrasah dalam dunia pendidikan nasional. Karena keberlangsungan dan keluwesan umat Islam saat ini lahir dari rahim-rahim madrasah, baik madrasah umum maupun madrasah pesantren.

Pemikiran demi pemikiran belum membuahkan hasil secara maksimal dalam menelusuri tipe pendidikan Islam yang paripurna dan ideal untuk Indonesia yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Namun setidaknya ada beberapa

---

<sup>34</sup>Oktradiks, Ahwy. (2012). "Hakikat Pendidikan Islam di Madrasah Ibtida'iyah Tinjauan Manajemen Pendidikan". Vol. 2, No 1, 17-33, hlm. 26

<sup>35</sup>Oktradiks, Ahwy. (2012). "Hakikat Pendidikan Islam, hlm. 26

komponen yang dapat dijadikan alternatif, yaitu: 1). Dengan pendekatan secara sistematis, maknanya reformasi dalam keseluruhan sistem pendidikan Islam formal yang telah ada. 2). Dengan pendekatan suplementer, maknanya menambah sejumlah perangkat pendidikan yang berbasis pada pemahaman ajaran Islam. 3). Dengan pendekatan komplementer, maknanya suatu upaya mengubah kurikulum secara total agar sinergi dan terpadu. Maksudnya perubahan kurikulum yang berorientasi pada *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan atau kemahiran), kompetensi spiritual ketuhanan Allah (tauhid ibadah).<sup>36</sup>

Melalui uraian di atas, penulis menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan Islam seperti madrasah (MI, MTs, dan MA) harus mendisain model-model pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Dari sini muncul pertanyaan penting tentang model-model pendidikan Islam dapat menjawab tantangan masa depan di dunia modern bahkan revolusi industri 4.0, yang akan membawa Indonesia ke masa keemasan atau Indonesia kuat dan baru.<sup>37</sup> Hasil analisis penulis menyatakan substantif tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 adalah Islamisasi dan Integralisme pendidikan Islam. Dengan memadukan kedua paradig pendidikan Islam tersebut kemungkinan besar akan terwujudlah dengan sebenarnya tujuan pendidikan dalam UU tersebut Bab II Pasal 3, yaitu: “dalam rangka mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak, sehat lahir batin, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, inovatif dan bertanggung jawab serta sangat demokratis”.

### **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).**

Menurut penulis setidaknya ada empat faktor bahwa SDIT sangat substantif dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang merupakan Islamisasi dan Integralisme pendidikan Islam, sesuai dengan tujuan pendidikan dalam UU tersebut Bab II Pasal 3, yaitu: “

---

<sup>36</sup>Oktradiks, Ahwy. (2012). “Hakikat Pendidikan Islam, hlm. 27

<sup>37</sup>Oktradiks, Ahwy. (2012). “Hakikat Pendidikan Islam, hlm. 27

mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang berIMTAQ dan berIPTEK, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan tanggung jawab juga demokratis”. Mengutip pendapat Suyatno dalam *“Integrated Islamic Schools In The National Education System”*. Ada empat faktor SIT sesuai Sisdiknas, yaitu:

### **Penggunaan Nama Sekolah**

Penggunaan nama “sekolah” pada Sekolah Islam Terpadu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini secara kelembagaan lebih dekat kepada ciri sekolah umum, bukan madrasah maupun pesantren. Pemakaian term “sekolah” sesungguhnya telah diakui dualisme kementerian, yaitu diknas dan kemenag. Di sisi lain, penggunaan nama “sekolah” didasarkan atas pertimbangan pragmatis bahwa selama ini sekolah lebih diminati oleh para peserta didik dari berbagai kalangan di Indonesia daripada madrasah maupun pesantren.<sup>38</sup>

Pertimbangan pragmatis, penggunaan nama “sekolah” terbukti telah membangun citra Sekolah Islam Terpadu sebagai lembaga pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman modern di kalangan masyarakat yang tidak memiliki basik keagamaan yang kuat. Sebagaimana jamak diketahui, sekolah merupakan lembaga pendidikan modern warisan penjajah Belanda. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang telah berkembang sebelumnya, sekolah memiliki keunggulan dari segi pengembangan sains dan teknologi.<sup>39</sup>

Sedangkan kata “terpadu” merupakan konsep yang digunakan untuk membangun citra sekolah islam terpadu bahwa di samping pengembangan sains dan teknologi, mereka juga mengembangkan pendidikan agama yang excellent. Kata “terpadu” sendiri merupakan simbol adanya kesatupaduan antara pengembangan sains dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5

<sup>39</sup>Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5

<sup>40</sup>Suyatno. (2015). “Sekolah Islam Terpadu, hlm. 5

### **Adopsi Kurikulum Nasional**

Pengadopsian kurikulum pada sekolah Islam terpadu merujuk pada kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu lima rumpun mata ajar dalam Sisdiknas, yaitu agama dan akhlak, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, serta jasmani, olah raga dan kesehatan. Kesemuanya ini pada dasarnya adalah bahagian dari ilmu keislaman. Kelima rumpun mata pelajaran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, mempelajari sains dan teknologi merupakan bagian pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. Sekolah Islam Terpadu hanya menambah beberapa mata pelajaran dalam struktur kurikulumnya, yang dinamakan dengan program ke-Islam Terpadu-an (ke-IT-an) (Dokumentasi struktur kurikulum SDIT, Bab IV, 278-279). Oleh karena itu, diintegrasikannya antara kurikulum pendidikan agama dan umum ditambah dengan program ke-IT-annya merupakan upaya untuk melakukan islamisasi kurikulum pendidikan.<sup>41</sup>

Kurikulum Sekolah Islam Terpadu juga membawa dampak islamisasi kegiatan pembelajaran di kelas. Kurikulum Sekolah Islam Terpadu melakukan islamisasi proses pembelajaran dengan tujuan untuk membentuk kesadaran dan pola berpikir secara integral dalam perspektif Islam. Wujud islamisasi kegiatan pembelajaran di kelas adalah adanya pembelajaran yang terintegrasi antara berbagai mata pelajaran. Semua guru dituntut untuk menyajikan semua materi pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan melalui pendekatan integral. Bahkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya sebuah kompetensi tidak hanya dilihat dari penguasaan terhadap indikator-indikator dari mata pelajaran saja, namun juga dilihat dari komitmen keislamannya.<sup>42</sup>

Islamisasi kurikulum dipengaruhi oleh pandangan bahwa Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Tindakan membedakan serta mengkotakkotakkan pendidikan umum di satu pihak dan pendidikan agama di pihak lain merupakan penyebab utama dari kerancuan dan kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Dampak dari sistem pendidikan yang dualistis adalah adanya penyempitan terhadap

---

<sup>41</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 6

<sup>42</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 6

makna agama hanya sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan baik di pesantren, madrasah, maupun pendidikan agama Islam di sekolah umum.<sup>43</sup>

### **Penyesuaian Sistem Ujian (evaluasi sekolah).**

Sekolah Islam Terpadu melaksanakan sistem penilaian sebagaimana yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Sistem penilaian terdiri dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas; sedangkan ujian meliputi ujian nasional dan ujian sekolah. Sistem penilaian tersebut dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari adopsi kurikulum yang dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu. Selain itu, fakta bahwa tidak semua alumni Sekolah Islam Terpadu melanjutkan di sekolah yang sama pada jenjang berikutnya mengharuskan sekolah ini melaksanakan sistem penilaian yang diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan lain.<sup>44</sup>

Namun demikian, Sekolah Islam Terpadu sangat menekankan penilaian aspek afektif dan psikomotorik, selain penilaian kognitif melalui ulangan harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir sekolah. Penilaian sikap dilakukan melalui pengamatan guru setiap hari. Kedekatan hubungan antara guru dan siswa di sekolah sangat memudahkan bagi guru untuk memberikan penilaian secara autentik dan objektif. Penilaian keterampilan diutamakan dengan praktek. Untuk menopang penilaian siswa secara komprehensif, sekolah juga menerapkan adanya buku penghubung. Buku penghubung ini dipakai sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua siswa agar perkembangan siswa di sekolah juga terpantau oleh guru.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 6

<sup>44</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8

<sup>45</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8

### **Sertifikasi Guru oleh Guru-Guru Sekolah Islam Terpadu.**

Keberadaan dan profesi guru di Sekolah Islam Terpadu juga menjadikan lembaga pendidikan ini semakin kuat ketergantungannya dengan Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun guru di Sekolah Islam Terpadu memiliki kriteria yang berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, misalnya; diseleksi oleh JSIT, diwajibkan memiliki hafalan dari beberapa juz al-Qur'an, memakai kerudung besar bagi guru perempuan. Keberadaan guru di sekolah ini tidak dapat lepas sepenuhnya dari kebijakan pendidikan nasional. Sebagaimana para guru di sekolah-sekolah lain, para guru di Sekolah Islam Terpadu juga mengikuti program sertifikasi guru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari Sekolah Islam Terpadu sebagai sekolah swasta yang tidak sepenuhnya mampu memberi gaji guru dari kantong pribadi sekolah.<sup>46</sup>

Program sertifikasi guru yang diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas tenaga pendidik. Salah satu poin penting program ini adalah program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Namun di samping itu, guru-guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebesar satu kali gaji per bulan. Karena itu, program sertifikasi guru menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas terhadap profesi guru. Tidak salah jika sekarang para alumni sekolah menengah di Indonesia berbondong-bondong mendaftar di fakultas keguruan. Demikian halnya dengan sekolah Islam terpadu, meskipun mereka pada awalnya banyak mengkritik sistem pendidikan nasional, banyak guru sekolah Islam terpadu juga ikut program sertifikasi.<sup>47</sup>

Maka dengan keempat faktor tersebut menambah jelas akan tingginya peranan SDIT atau SIT (sekolah islam terpadu) dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai undang-undang yang ada, yang pada substantifnya adalah islamisasi dan integralisme pendidikan Islam.

---

<sup>46</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8

<sup>47</sup>Suyatno. (2015). "Sekolah Islam Terpadu, hlm. 8

Kaitannya dengan legalitas dan formalitas, baik ilmu maupun administrasinya kedua lembaga pendidikan Islam tersebut sudah sangat tinggi dan sejajar, sederajat dengan pendidikan umum setara yaitu sekolah dasar (SD). Hal ini dapat dilihat dari pengakuan atas MI dan integralnya kurikulum keduanya, yaitu kurikulum umum dan agama, sesuai ciri khasnya bahwa MI madrasah berbasis sekolah (imtaq dan iptek) dan SDIT sekolah berbasis agama (iptek dan imtaq).

## **KESIMPULAN**

Kemunculan dan keberadaan madrasah selalu diawali dengan adanya gerakan perubahan secara intelektual keagamaan yang mereka ajarkan melalui organisasi Islam yang ada di nusantara, baik Jawa, Sumatera maupun Kalimantan bahkan Maluku dan Sulawesi. Lembaga pendidikan saat ini ada tiga model yang berkembang di Indonesia yaitu sekolah (umum) sebagaimana tersebut di atas, madrasah (agama) demikian juga tersebut di atas, dan pesantren. Ketiganya menurut sebagian pemikir tidak dapat mewujudkan tujuan pendidikan sisdiknas. Analisis penulis menyatakan substantif tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 adalah Islamisasi dan Integralisme pendidikan Islam. Dengan memadukan kedua paradigma pendidikan Islam tersebut kemungkinan besar akan terwujudlah dengan sebenarnya tujuan pendidikan. Ada empat faktor bahwa SDIT sangat substantif dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang merupakan Islamisasi dan Integralisme pendidikan Islam, sesuai dengan tujuan pendidikan dalam UU tersebut Bab II Pasal 3, yaitu: “dalam rangka mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak, sehat lahir batin, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, inovatif dan bertanggung jawab serta sangat demokratis”. Kaitannya dengan legalitas dan formalitas, baik ilmu maupun administrasinya kedua lembaga pendidikan Islam tersebut sudah sangat tinggi dan sejajar, sederajat dengan pendidikan umum setara yaitu sekolah dasar (SD). Hal ini dapat dilihat dari pengakuan atas MI dan integralnya kurikulum keduanya, yaitu kurikulum umum dan agama, sesuai ciri khasnya bahwa MI madrasah berbasis sekolah (imtaq dan iptek) dan SDIT sekolah berbasis agama (iptek dan imtaq).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2004). *Etika Tauhid Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama dalam menyatukan kembali ilmu-ilmu agama dan umum*. Yogyakarta: UIN Suka Press, IAIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah, M. Amin. (2005). *Dalam Menyatukan kembali Ilmu-ilmu agama dan umum Upaya mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, UIN Suaka.
- Al-Atas, Muhammad Naquib. (2001). *Islam dan Sekulerisme*. Bandung : Pustaka.
- Al-Faruqy, Ismail Raji. (2004). *Islamisasi Pengetahuan*. terj. Anas Mahyudin. Bandung: PustakaPerpustakaan Salman Institute Teknologi.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. (2010). "Integrasi Ilmu dan Agama: Studi Atas Paradigma IntegratifInterkonektif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Kodifikasia, Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya Nomor 1 Volume 4*, 181-214.
- Departemen Agama RI. (2005). *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Drajat, Manpan. (2018). "Sejarah Madrasah di Indonesia". *al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No.1*, 196-206.
- Fathoni, M. K. (2015). *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fiteriani, Ida. (2014). "analisis Model Integrasi ilmu dan agama dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar Islam Bandar Lampung". *Terampil, Vol 2, Nomor 2*, 1-35.
- Hasyim, Rosnani dan Imron Rosyidi. (2000). "Islamization Of Knowledge Comparative Analysis Of The Conception Of Al-Atas And Al-Faruqi", *Journal Of The Kulillyah (Faculty) Of Islamic Reveald And Human Science International, Vol ,8,No.1*.
- Istikomah. (t.th). "Integrasi Ilmu sebuah konsep pendidikan Islam Ideal". *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*.
- Kosim, Mohammad. (2007). "Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)". *Tadris. Volume 2. Nomor 1*, 41-57.
- Lembaran Negara. (2003). *Undang-undang Sistem pendidikan Nasional*. Jakarta: Sisdiknas, 1-33.
- Maksum. (2000). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Mualimin. (2017). "Lembaga Pendidikan Islam Terpadu". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I*, 99-116.
- Munawir, A.W. (1997). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muqowim. (2012). *Geneologi Intelektual saintis sebuah muslim sebuah kajian tentang pola pengembangan sains dalam islam periode Abbasiyah*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Nakosteen, Mehdi. (2006). *Kontribusi islam atas Dunia intelektual barat deskripsi analisis abad kekemasan Islam*. terj. Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Harun. (2010). *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Nata, Abudin. (2001). *Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer, Deliar. (2005). *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1990-1942*. Jakarta, LP3ES.
- Oktradiks, Ahwy. (2012). "Hakikat Pendidikan Islam di Madrasah Ibtida'iyah Tinjauan Manajemen Pendidikan". Vol. 2, No 1, 17-33.
- Rahman, Fazlur. (2005). *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*. terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Santoso, M. Abdul Fattah. (2016). "Rekonstruksi Epistemologi Keilmuan Islam: Tinjauan, Sumber, Tujuan, dan Metode Keilmuan". Makalah untuk Seminar Internasional, "Rekonstruksi Epistemologi Islam oleh UMS dan IIT East and Southeast Asia, 24 Mei, Indonesia: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Supani. (2009). "Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia". *Insania*|Vol. 14|No. 3, 1-14.
- Suyatno. (2015). "sekolah Islam terpadu dalam sistem pendidikan Nasional integrated Ilamic Schools in the Natinal Education Sistem". *Al-Qalam*, Volume 21 Nomor 1, 1-10.
- Yunus, Muh. (2014). "Integrasi Agama dan Sains: Merespon Kelesuan Tradisi Ilmiah di PTAP". *Insania*, Vol. 19, No. 2, 284-313.
- Zainuddin, M. (2004). "UIN Menuju Integrasi Ilmu dan Agama" dalam M. zainuddin, dkk, editir, "memadu sains dan agama menuju universitas Islam masa depan". Malang: Bayumedia Publishing.